

Minyak Cong Sumsel, Kapolri – Presiden Diharapkan Beri Perhatian Khusus dan Serius

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Indonesian Audit Watch (IAW) tidak pernah lelah menyampaikan temuannya terkait dugaan tindak pidana penambangan minyak mentah ilegal atau minyak cong di Sumatera Selatan yang lantas diolah menjadi [BBM](#) (Minyak Standar Pertamina).

Indonesian Audit Watch melihat bahwa kondisi penambangan dan pengolahan minyak ilegal (Illegal Drilling dan Illegal Refinery) di [Sumatera Selatan](#) sudah sangat tidak bisa ditoleransi.

“Hingga kini kegiatannya tetap saja marak meski beberapa waktu sempat berhenti,” ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (25/10/2024).

“Peredarannya sudah meluas hingga seluruh pelosok Indonesia. Tentunya, hal itu merugikan pihak Pertamina, dan khususnya masyarakat yang menggunakannya,” tambahnya.

****Baca Juga: [Minyak Cong Kian Merajalela, Kapolda Sumsel Baru Belum Ada Gebrakan Berarti](#)**

Iskandar mengatakan pergantian Kapolda Sumsel yang baru belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, utamanya dalam menekan laju praktik Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

IAW berharap Kapolri dapat memberikan perhatian khusus untuk wilayah Sumatera selatan. "Oleh karena itu, melihat peredaran minyak cong malah makin luar biasa, ada baiknya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sesegara saja melakukan assessment," tegas Iskandar.

"Dengan cara menugaskan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri untuk melakukan atau mengumpulkan data, membuat analisa evaluasi (anev) hingga memeriksa kinerja jajarannya," katanya.

Iskandar menambahkan hal ini adalah kekhawatiran yang luar biasa di saat perekonomian Indonesia memburuk. "Saat ekonomi ambruk, tetapi uang-uang hitam beredar dengan sangat lancar dan berputar luar biasa," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam memiliki pandangan berbeda. "Saya kira tidak hanya tugas Kapolda Sumsel yang harus turun tangan memberantas mafia tambang cong," jelasnya kepada wartawan, Jum'at (25/10/2024).

Jika hanya diserahkan kepada Kapolda semata tidak tepat. "Maka tidak cukup jika hanya diserahkan kepada Kapolda, butuh dukungan dan sinergitas baik pemerintah pusat maupun pihak Bareskrim Mabes Polri," ujarnya.

"Saya kira, semua bertanggung jawab terhadap pemberantasan mafia minyak ilegal, termasuk Bareskrim dan Pemerintah Pusat juga harus ikut andil," imbuhnya.

Jika dianalisa secara seksama, kata Anam, pemerintah Prabowo sedang gencar dalam peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara. Salah satunya jangan sampai ada kebocoran dari sektor hasil sumber daya alam.

"Karena mafia migas ruang lingkungannya kan luas dan bahkan jaringannya bisa internasional, maka tidak cukup jika hanya diserahkan kepada daerah semata, butuh uluran tangan dan

sentuhan pusat,” tegasnya.

Pembehanan tambang-tambang illegal harus juga menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo jika konsisten ingin meningkatkan pemasukan negara, jangan sampai sektor tambang menjadi sektor yang dengan mudah dipermainkan oleh pihak asing.

“Semua mesti bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah daerah, tapi harus bersama-sama dengan pemerintah pusat dan Kapolri juga harus ada keinginan untuk memberantas dan membenahi mafia migas di Indonesia,” jelasnya.

“Jika kasus tambang illegal terus menerus terjadi, maka jangan harap pemerintah akan mendapatkan optimalisasi pendapatan anggaran negara dari sektor migas,” sambungnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid ini mencermati, saat ini seperti kucing-kucingan, pusat seolah-olah menyerahkan kepada daerah, daerah tidak berdaya melakukan pembenahan-pembenahan karena canggihnya oknum yang mengelola tambang minyak ilegal.

****Baca Juga: [Minyak Cong di Sumsel Tetap Marak, Aktivis Ramai-ramai Pertanyakan Kinerja Satgas Illegal Drilling dan Refinery](#)**

“Untuk itu butuh sokongan kekuatan dari pusat untuk memberantas mafia migas di Indonesia. Dengan adanya sinergitas antara pusat dan daerah, maka akan semakin memaksimalkan penegakan hukum terhadap penggerusan sumber daya alam dibidang minyak cong,” kata Anam.

“Tentu itu merupakan tugas bersama, jangan hanya seperti diserahkan kepada daerah semata, namun isu tersebut harus menjadi isu bersama guna melakukan perlawanan secara bersama-sama terhadap pengusutan mafia migas di sumsel dan bahkan diseluruh wilayah Indonesia,” tandasnya. (Oke)

Pelantikan Presiden Prabowo Diramaikan Kader Gerindra Banten

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Minggu, 20 Oktober 2024, bakal diramaikan oleh kader [Gerindra](#) Banten.

Dibawah komando Andra Soni, selaku Ketua Gerindra Banten, mereka akan meramaikan sekitaran Gedung [DPR/MPR](#), hingga ke kawasan Patung Kuda, Jakarta, bergabung dengan Pesta Rakyat.

“Dalam prosesi pelantikan Bapak Prabowo Subianto di gedung MPR DPR, kami kami kader Gerindra Provinsi Banten akan kebersamai dalam rencana pesta rakyat sepanjang gedung MPR sampai dengan Patung Kuda,” ujar Andra Soni, dalam keterangan resminya, Minggu, (20/10/2024).

Andra Soni bersama Dimiyati Natakusumah yang maju di Pilgub Banten 2024 berharap Prabowo Subianto bisa menjalankan amanah rakyat Indonesia dengan baik, jujur dan adil. Serta bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

**Baca Juga: [Debat Perdana, Maesyal-Intan Beberkan Visi-misi Bangun Kabupaten Tangerang Lima Tahun Kedepan](#)

Andra Soni beserta seluruh kader Gerindra Banten berjanji akan membawa kondusifitas di Bumi Jawara, serta membantu seluruh program pemerintah pusat yang berpihak pada rakyat, terutama percepatan pembangunan di segala bidang.

“Tentu harapan masyarakat besar kepada Bapak Prabowo Subianto, untuk membawa Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Insha Allah kami seluruh kader Gerindra Provinsi Banten akan mendukung upaya upaya percepatan pembangunan yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto,” jelasnya.

Pria yang kini maju sebagai Cagub Banten 2024 itu mengaku bahwa pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

“Ini adalah kemenangan rakyat, Insha Allah rakyat akan bersuka cita terhadap pemimpin baru hasil Pemilu 2024,” terangnya.
(Dhi)

Partai Gelora Minta Prabowo Sampaikan Pidato Kebudayaan Begitu Resmi jadi Presiden

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Partai Gelombang Rakyat ([Gelora](#)) Indonesia berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kebudayaan usai dilantik secara resmi sebagai Presiden RI-8 pada Minggu (20/10/2024) mendatang.

“Di Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, saya sudah mengusulkan agar Pak Prabowo begitu dilantik sebagai Presiden, menyampaikan Pidato Kebudayaan,” kata Dedi Miing Gumelar, Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora dalam [Gelora Talks](#), Rabu (16/10/2024) sore.

Dalam diskusi dengan tema ‘Jelang Pelantikan Presiden Terpilih: Agenda Prioritas dan Tantangannya’ itu, Miing mengatakan, bahwa pidato kebudayaan saat penting di era kompetensi sekarang.

****Baca Juga: [Janji Tak Ada Lagi Daerah Tertinggal, Andra Soni: No One Left Behind](#)**

“Kebudayaan jangan hanya dipersepsikan kesenian atau peninggalan artefak saja. Tetapi kebudayaan itu, adalah pengejawantahan dari budaya, sebab bangsa yang unggul adalah bangsa yang berbudaya. Budaya itu pemikiran,” katanya.

Menurut dia, pidato kebudayaan yang disampaikan oleh seorang pemimpin dapat mengubah paradigma atau cara pandang rakyatnya terhadap attitude sikap dan perilaku sehari-hari yang dinilai masih rendah.

“Apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin yang meminta agar para ketum parpol agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari [APBN](#), itu adalah sebuah pemikiran, atau budaya,” katanya.

Prabowo, mau menunjukkan bahwa muncuri uang [APBN](#) itu sebagai tindakan yang tidak bermoral, dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi justru diambil untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya kira Pak Prabowo tidak hanya sekedar bicara politik akomodatif, tetapi juga ingin memperbaiki budaya rakyatnya seperti rasa malu, moralitas dan attitude yang dimulai dari menyadarkan para pemimpinnya di pemerintahan,” ujar Miing.

Miing menilai Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang beradab yang dipandang dunia. Sehingga tujuan Indonesia Emas 2045, yang akan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia atau negara maju akan tercapai.

“Pak Prabowo akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan Pidato Kebudayaan. Dalam pidato itu, sampaikan bahwa Pak Prabowo punya pemikiran ingin menjadikan bangsa yang unggul. Maka perlu diciptakan SDM yang unggul, salah satu instrumennya selain pendidikan adalah makan bergizi gratis,” katanya.

Partai [Gelora](#) berharap agar Pidato Kebudayaan itu, disampaikan Prabowo di Taman Ismail Marzuki atau Gedung Kesenian Jakarta, bukan di Istana Negara agar bisa menyatu bersama rakyat.

“Pak Prabowo ini adalah sosok pemimpin atau leader yang sudah ditunggu-tunggu rakyat, beliau serius ingin menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul. Sebab, tidak ada bangsa didunia yang maju, kalau budayanya rendah. Pak Prabowo mulai membangun peradaban Indonesia,” pungkasnya.

Sudah Diuji Coba PBB

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi

Kepresidenan Hamdan Hamedan mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan merupakan program baru. Tetapi, program tersebut sudah diberlakukan di lebih dari 100 negara.

“Penerima manfaatnya sudah lebih dari 400 juta murid. Lebih dari 50 persen murid di dunia penerima manfaat program MBG ini. Program ini sudah diuji para peneliti di lebih 100 negara dan sudah diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah dunia. Program ini juga sudah diuji coba PBB,” ungkapnya.

Program MBG ini, kata Hamdan, mempunyai tiga tujuan, yakni mencetak generasi yang lebih sehat, generasi yang lebih cerdas dan memajukan ekonomi.

“Dalam konteks Indonesia, program MBG ini ingin memberikan asupan gizi yang seimbang kepada ibu hamil, balita, anak PAUD, anak sekolah hingga SMA dan para santri di pesantren,” jelasnya.

Hamdan mengatakan, program MBG ini akan diberlakukan secara bertahap. Pada 2025 ini ditargetkan 15-25 juta penerima manfaat dari 89 juta penerima manfaat.

Menurutnya, saat ini sekitar 30 persen atau sepertiga anak-anak Indonesia mengalami anemia, selain banyak anak-anak yang pergi ke sekolah tidak sarapan, sehingga mengganggu konsentrasi dalam belajar di sekolah dan bisa mereduksi IQ.

****Baca Juga: [Partai Gelora Kab Serang “Panaskan Mesin Partai” Menangkan Andika-Nanang di Pilbup Serang 2024](#)**

Disamping itu juga banyak anak-anak Indonesia yang belum memperoleh gizi yang seimbang. Oleh sebab itu, perlu diberlakukan program MBG untuk mengatasi dampak kesehatan anak-anak tersebut.

“Dari segi kecerdasan, misalkan ketika program ini diberlakukan di India dan diwajibkan di dalam konstitusinya, bahwa ini adalah hak anak-anak di India untuk menerima makan

bergizi gratis. Setelah 5 tahun penerima manfaat ini diuji, kemampuan membaca, matematika, konsentrasi dan tingkat kehadiran siswanya tinggi. India berhasil membuat potensi anak-anak bangsanya lebih cerdas. Dan kita lihat sekarang, India sudah bisa menguasai teknologi, dan SDMnya menguasai korporasi-korporasi dunia,” jelasnya.

Hamdan menegaskan, program ini tidak hanya diberlakukan di negara berkembang, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Swedia. Di negara tersebut, baik yang siswanya mampu atau tidak mampu mendapatkan MBG.

“Ketika tahun 2002-2003, saya tinggal di keluarga tidak mampu sebagai student di Amerika. Saya diberikan akses untuk mendapatkan makan bergizi gratis di kelas. Makanan tersebut adalah makanan terbaik dinikmati dibandingkan di rumah,” kenangnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ([HIPMI](#)) Anggawira mengatakan, pihaknya mendukung penuh program MBG ini, dalam rangka menjawab tantangan ke depan Indonesia sebagai bangsa.

“Program MBG ini direncanakan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen setiap tahunnya, mendukung [UMKM](#) dan menciptakan industrialisasi yang makin berkembang,” kata Anggawira.

[HIPMI](#), lanjutnya, akan mendorong program MBG ini terealisasi dan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.

“Kita optimis program MBG ini akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata, setiap tahunnya diatas 5 persen,” tegas Sekjen [HIPMI](#) ini. (Red)

Reshuffle Kabinet Sisa Masa Jabatan Presiden Jokowi 1,5 Bulan Lagi: Keputusan yang Tidak Tepat dan Menghamburkan Keuangan Negara

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet di penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik mengenai urgensi serta manfaat dari reshuffle ini, terutama karena sisa waktu masa jabatan hanya sekitar 1,5 bulan.

Saya memandang bahwa reshuffle ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga memboroskan anggaran negara dan dapat menimbulkan kesan bahwa penggantian menteri dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara.

Mengganti menteri dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari dua bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan, merupakan langkah yang tidak efisien dari segi kinerja maupun anggaran. Menteri baru yang diangkat dalam waktu sesingkat itu tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau perubahan signifikan.

****Baca Juga: [Ratusan Warga Islamic Vilage Kelapa Dua Nobar Bersama Maesyal Rasyid](#)**

Waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan posisi baru dan memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan kontribusi yang berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tidak akan berdampak, menjadikan pergantian ini tidak lebih dari sekadar formalitas politik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih bijaksana jika Presiden menunjuk seorang Pelaksana Tugas (PLT) dari dalam kementerian itu sendiri, di bawah koordinasi kementerian terkait, daripada melakukan reshuffle yang penuh biaya.

Penunjukan PLT akan lebih efektif karena pejabat yang ditunjuk biasanya sudah memahami seluk-beluk kementerian dan tidak perlu melewati proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih optimal di sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi. Selain itu, langkah ini juga bisa menghemat anggaran negara yang semestinya tidak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan penyesuaian birokrasi lainnya.

Reshuffle ini juga menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, seolah-olah Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan, yang dapat memunculkan spekulasi

bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi kepada pribadi presiden.

Pergantian ini bisa dilihat sebagai langkah yang lebih didorong oleh kepentingan pribadi atau politik, bukan kepentingan negara yang lebih luas. Hal ini sangat berbahaya bagi citra good governance dan akuntabilitas pemerintahan, terutama di akhir masa jabatan. Kepentingan negara seharusnya menjadi prioritas utama, dan dalam hal ini, langkah yang diambil justru memperlihatkan sebaliknya.

Dalam kondisi di mana negara menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global, kebijakan yang efisien dan berfokus pada kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. Pemborosan anggaran untuk reshuffle kabinet yang tidak memberikan dampak signifikan adalah keputusan yang keliru.

Uang yang dihabiskan untuk pelantikan, penyesuaian staf, dan proses transisi di kementerian seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak, seperti pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, atau penguatan sektor-sektor strategis yang sedang dalam krisis.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keputusan reshuffle ini juga bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Publik berhak untuk menuntut penjelasan mengenai urgensi dan dasar pertimbangan di balik keputusan ini. Dalam konteks anggaran yang terbatas dan prioritas kebijakan yang harus difokuskan, reshuffle di penghujung masa jabatan ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan dengan matang alokasi anggaran dan kepentingan publik.

Kesimpulannya, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi di sisa masa jabatan 1,5 bulan ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga memboroskan anggaran negara dan dapat menimbulkan persepsi negatif tentang motivasi di balik keputusan tersebut. Penunjukan PLT di bawah koordinasi

kementerian terkait akan jauh lebih efisien, baik dari segi anggaran maupun kinerja.

Pemerintah seharusnya berfokus pada penyelesaian program-program yang telah dijalankan dan menjaga stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan, bukan memperkenalkan langkah-langkah yang justru dapat merusak citra tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. □(Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan dan Ekonom UPN Veteran Jakarta)

Istana: Presiden Berkantor Selama 40 Hari di IKN hingga 19 Oktober

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi

Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo akan mulai berkantor selama 40 hari di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur tanggal 10 September hingga 19 Oktober 2024.

“Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober). Kemungkinan dari tanggal 10 (September) sampai tanggal 19 Oktober,” kata Heru saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.

Heru mengatakan Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN di sela-sela waktu tersebut.

****Baca Juga:** [KPK Setor ke Negara Rp40,5 Miliar Uang Rampasan dari Rafael Alun](#)

Selain itu, agenda kerja Presiden di IKN juga akan melaksanakan rapat bersama pejabat terkait.

“Beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat,” katanya.

Saat ditanya lebih lanjut soal kurun waktu Presiden berkantor di IKN, Heru memastikan Presiden Jokowi akan berada di IKN selama 40 hari hingga 19 Oktober 2024.

“Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian,” kata Heru.

Heru menambahkan sejumlah aparatur sipil Negara (ASN) dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk Sekretariat Presiden juga sudah mulai berkantor di IKN. (ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Presiden Ajak Pimpinan Lembaga Negara Tinjau Infrastruktur IKN

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan lembaga negara meninjau sejumlah infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang momen puncak peringatan Hari Kemerdekaan Ke-79 RI.

Kunjungan dimulai dari Sumbu Kebangsaan, sebuah area yang menjadi pusat simbolik bagi keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia.

Setelah itu, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Istana Garuda dengan menggunakan mobil golf.

Istana Garuda, yang baru saja rampung, menunjukkan perpaduan arsitektur modern dengan nuansa tradisional, mencerminkan identitas nasional yang kuat.

**Baca Juga: [Kapolri Ajak Kobarkan Semangat dan Tekad Baru](#)

dalam Rangka HUT RI

Rombongan kemudian menuju lobi Presiden, sebelum melanjutkan ke Ruang Sidang Kabinet.

Di ruangan ini, Presiden memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya fasilitas ini untuk kelangsungan pemerintahan di masa mendatang.

Selanjutnya, rombongan dibawa ke area dek pandang, sebuah platform di Istana Garuda yang menawarkan pemandangan spektakuler seluruh kawasan IKN.

Di sini, para pimpinan lembaga negara berkesempatan untuk berfoto bersama, mengabadikan momen bersejarah ini.

Perjalanan dilanjutkan dengan menaiki eskalator menuju Istana Negara, di mana rombongan kembali mengabadikan momen bersama di tangga Istana Negara, salah satu ikon baru di Ibu Kota Nusantara.

Dalam wawancara singkat setelah kunjungan, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah, mengungkapkan kekagumannya terhadap pembangunan yang telah dilakukan.

Ia juga menceritakan kunjungannya ke embung beberapa bulan yang lalu dan terkejut melihat perkembangan yang pesat.

“Pagi ini saya bangun tidur langsung siap berkeliling dengan Pak Presiden dan pembangunannya menurut saya spektakuler, bagus sekali, jadi selamat untuk keberhasilan bangsa Indonesia tentunya,” ungkap Siti.

Sementara itu, Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan rasa syukur atas undangan Presiden untuk melihat langsung Istana Negara dan Istana Garuda.

Hatta juga menekankan bahwa pembangunan IKN ini menjadi simbol kemajuan peradaban, pemerataan pembangunan, dan pemersatu bangsa.

“Tentu saja kita berharap bahwa dengan adanya istana dan ibu kota di Indonesia Timur ini, ini menunjukkan tidak hanya pemerataan tetapi juga sekaligus pemersatu kesatuan bangsa,” ujar Hatta.

Hatta pun optimistis bahwa meskipun butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan pembangunan sepenuhnya, progres yang ada menunjukkan bahwa IKN akan menjadi ibu kota yang baik dan indah.

“Saya optimistis bahwa ini akan walaupun tentu tidak bisa 1-2 tahun akan tetapi ini kalau melihat dari progres yang ada saya kira ini akan menjadi ibu kota kita yang baik, yang indah,” tutur Hatta.(Ant)

Presiden Sampaikan Terima Kasih pada Rakyat Lalu 10 Tahun dengan Kuat

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah bersama-sama melintasi tantangan dan perubahan selama 10 tahun ini dengan kuat.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini,” kata Presiden Jokowi, seperti dalam tayangan langsung melalui akun YouTube DPR RI yang disaksikan di Jakarta.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun ke sepuluh dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

**Baca Juga:[Memberantas Mafia Tanah Melalui Digitalisasi Sertifikat](#)

Pada tahun ini pula, KH. Ma'ruf Amin genap menjabat tahun kelima sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden menilai jabatan tersebut sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

"Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa sejak hari pertama menerima amanah, Presiden menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi dan banyak tantangan yang harus diselesaikan.

Namun demikian, Presiden meyakini bahwa ia tidak akan melalui tantangan tersebut sendirian. Doa dan dukungan dari masyarakat lah yang menguatkan Presiden menghadapi berbagai gelombang dan tantangan itu.

"Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air adalah sumber kekuatan saya," kata Presiden.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025.(Ant)

Presiden Serahkan 43.122 Hektare Lahan Bersertifikat TORA kepada Masyarakat

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 43.122 hektare lahan bersertifikat hak pengelolaan tanah kepada masyarakat melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Expo LIKE 2 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/8/2024).

“Hari ini, 20 SK terdiri atas 43.122 hektare yang diserahkan Bapak Presiden di acara ini kepada masyarakat,” katanya.

Dikatakan Airlangga, lahan tersebut merupakan bagian dari Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) yang kini telah terbit sebanyak 173 SK seluas total 296.736 hektare dan telah diserahkan kepada masyarakat.

****Baca Juga:**[Pemerintah Batasi Transfer Pulsa Rp1 Juta Sehari Tekan Transaksi Judi](#)

Dari total 20 SK yang diserahkan oleh Presiden kepada perwakilan penerima, kata Airlangga, sebanyak 16 SK di antaranya merupakan lahan sawit yang dikelola 8.496 pekebun.

Sementara, SK hijau atau hutan sosial sebanyak 696 SK dengan luas lahan 7,47 hektare. Sebanyak 40 SK di antaranya dengan luas lahan 16.800 hektare diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada 3.526 kepala keluarga.

Airlangga mengatakan, program Reformasi Agraria adalah pilar utama pemerataan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi sejak 2017 untuk memberikan perlakuan yang sama dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat.

“Untuk itu, penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan menjadi penting, salah satu yang diterapkan kebun sawit rakyat agar mendukung tata kelola yang baik,” katanya.(ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Presiden: Penggunaan Produk Lokal Kabupaten/Kota Masih 41 Persen

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Presiden Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41 persen sehingga perlu ditingkatkan.

“Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di

Jakarta Convention Center, Jakarta.

****Baca Juga:** [Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Hasyim Asy'ari](#)

Kepala Negara meminta pemerintah kabupaten/kota berhati-hati dalam penyerapan anggaran karena menteri keuangan begitu sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor, rupiah demi rupiah.

“Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNB, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Ibu Menkeu. terkumpul jadi penerimaan negara,” kata Jokowi.

Presiden menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain.

“Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa periode lima tahun ke belakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan.

Dari sisi kesehatan terjadi pandemi COVID-19, kemudian di sisi situasi global terjadi perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta di sisi lingkungan terjadi gelombang panas, El Nino hingga La Nina.

“Ini menyebabkan banyak sekali, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada,” ujar Presiden. (ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

KSP: Presiden Segera Terbitkan Keppres Terkait Pemberhentian Ketua KPU

written by Kabar 6 | 25 Oktober 2024



Kabar6-Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden segera menerbitkan Keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

“Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP, insyaallah secepatnya akan ditindaklanjuti

dengan penerbitan Keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP," ujar Ngabalin dalam pesan video yang diterima wartawan, di Jakarta, Rabu dilansir Antara Rabu (3/7/2024).

Ngabalin mengatakan pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga berwenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu.

****Baca Juga:**[KPU Kota Serang Klaim Dokumen C Hasil yang Hilang Hanya ada Enam](#)

Pemerintah memastikan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU RI, terkait kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.

Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Hasyim awalnya dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), selaku kuasa hukum korban, pada Kamis 18 April 2024.

Kuasa hukum korban menilai perbuatan Ketua KPU RI Hasyim

Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adapun setelah putusan DKPP dibacakan, kuasa hukum korban menyebut upaya pemidanaan terhadap Hasyim Asy'ari saat ini menjadi selangkah lebih maju.

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dirinya terkait kasus dugaan asusila.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu," ujar Hasyim.

Ia juga meminta maaf kepada awak media apabila selama dirinya menjabat sebagai Ketua KPU RI terdapat perkataan atau tindakan yang kurang berkenan.

"Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan saya mohon maaf," katanya.(red)